



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PARE-PARE

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NURLINAH K.**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **53177**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.090.000.000**

1. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA POLEWALI MAMASA, WARISAN Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA PAREPARE , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 532.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOBIL, PAJERO SPORT DAKKAR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 55.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 2.250.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.679.250.000**

III. HUTANG **Rp. 450.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 1.229.250.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.